

Rancangan Undang-Undang tentang
Perampasan Aset Terkait dengan Tindak
Pidana (RUU Perampasan Aset)

AKD: Rancangan Undang-Undang tentang
Perampasan Aset Terkait dengan Tindak
Pidana (RUU Perampasan Aset)

Bulan: September 2026

Oleh: Rancangan Undang-Undang tentang
Perampasan Aset Terkait dengan Tindak
Pidana (RUU Perampasan Aset)

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: perpustakaan@dpr.go.id

Web: perpustakaan.dpr.go.id

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) merupakan salah satu rancangan undang-undang yang telah melalui perjalanan panjang dalam proses legislasi nasional. Gagasan mengenai pengaturan perampasan aset sebenarnya telah berkembang sejak lama sebagai bagian dari upaya memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana serta melengkapi instrumen hukum yang tersedia dalam penegakan hukum di Indonesia.

Seiring perkembangannya, RUU ini terus menjadi perhatian berbagai pihak dan telah melalui sejumlah tahapan pembahasan. Mulai dari penyusunan naskah akademik, kajian oleh berbagai lembaga, hingga pembahasannya dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas), RUU Perampasan Aset mengalami berbagai dinamika yang mencerminkan kompleksitas isu yang diatur di dalamnya. Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan regulasi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga menyentuh berbagai pertimbangan hukum, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan.

Secara umum, RUU Perampasan Aset mengatur mekanisme perampasan aset yang berasal dari atau berkaitan dengan tindak pidana melalui proses hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Materi yang diatur mencakup penelusuran aset, pengelolaan aset yang disita, mekanisme perampasan aset, perlindungan hak pihak yang berkepentingan, serta pengelolaan aset yang telah dirampas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan tersebut juga berkaitan dengan upaya penguatan pemulihan aset hasil tindak pidana sebagai salah satu bagian dari sistem penegakan hukum.

Dalam proses pembahasannya, sejumlah isu turut mewarnai perkembangan RUU ini. Di antaranya adalah pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan hak kepemilikan yang sah, mekanisme pembuktian, keselarasan dengan prinsip-prinsip negara hukum, serta koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan dan pemulihan aset. Berbagai pandangan, kajian, dan masukan yang berkembang menjadi bagian dari proses pembahasan yang masih berlangsung hingga saat ini.

Sistem Paket Informasi Terkini (SIPINTER) ini disusun untuk menghimpun berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. Paket informasi ini memuat beragam referensi, mulai dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, kajian, artikel ilmiah, hingga pemberitaan yang mendokumentasikan perjalanan dan perkembangan pembahasan RUU dari waktu ke waktu. Informasi yang tersaji telah dikurasi dan disusun secara sistematis untuk memudahkan penelusuran berbagai informasi yang berkaitan dengan RUU dimaksud.

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	Approved, the Bill on Asset Forfeiture included in 2025 Priority National Legislation Program	https://kemenkum.go.id/english\n-language-news/disepakati-ruu-\ntentang-perampasan-aset-masuk-\ndalam-prolegnas-prioritas-2025
Berita	Jangan Asal Rampas Harta! 7 Catatan Akademisi untuk RUU Perampasan Aset	https://www.hukumonline.com/berita/a/jangan-asal-rampas-harta-7-catatan-akademisi-untuk-ruu-perampasan-aset-lt6abb10b91b\n5f9/
Berita	Legislator PKS: RUU Perampasan Aset Tak Boleh Berhenti pada Penyitaan, Pengelolaannya Harus Profesional	https://pks.id/content/legislator-pks-ruu-perampasan-aset-tak-boleh-berhenti-pada-penyitaan-pengelolaannya-harus-profesional
Berita	RUU Perampasan Aset Masuk Pembahasan Batang Tubuh, Selaraskan Hukum Pidana Nasional	https://www.dpr.go.id/kegiatan\n-dpr/berita/RUU-Perampasan-Aset-Masuk-Pembahasan-Batang-Tubuh-Selaraskan-Hukum-Pidana-Nasional-67747
Berita	RUU Perampasan Aset Masuk Pembahasan Batang Tubuh, Selaraskan Hukum Pidana Nasional	https://jdih.dpr.go.id/berita/\ndetail/id/67747/t/RUU+Perampasan+Aset+Masuk+Pembahasan+Batang+Tubuh%2C+Selaraskan+Hukum+Pidana+Nasional
Berita	Soroti Mekanisme Perampasan Aset, Legislator: Jangan Rugikan Korban Salah Sita!	https://www.dpr.go.id/kegiatan\n-dpr/berita/Soroti-Mekanisme-Perampasan-Aset-Legislator-Jangan-Rugikan-Korban-Salah-Sita-6\n9592
Jurnal	Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi	https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/19\n782
Jurnal	Analisis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Makassar	https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/158\n1/569
Jurnal	Analisis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Sistem Pemerintahan Indonesia	file:///C:/Users/user/Download\ns/Hukum+vol+2+no+6+november+20\n25+hal+01-10.pdf
Jurnal	KEBIJAKAN FORMULASI MENGENAI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI	https://e-resources.perpusnas.go.id:2117/media/publications/\n579273-kebijakan-formulasi-mengenai-perampasan-5dc01e1e.pdf?\nexp=1790930913&kid=1&sig=1MhT9\nLqWrEIWeOkNeSvsusekQo5eqG5Po5C\nQs14wN5E
Jurnal	Kekosongan Hukum Dalam Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/5168/3\n347
Jurnal	Kesesuaian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan Pemulihan Kerugian Negara	https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/\n1582/734
Jurnal	MEKANISME PERAMPASAN ASET DENGAN MENGGUNAKAN NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI	https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/18352/14560
Jurnal	PENEGAKAN HUKUM ATAS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI	https://e-resources.perpusnas.go.id:2117/media/publications/\n537032-none-bc128f0d.pdf?exp=1790918432&kid=1&sig=BVkdOUosrr\nKXmiCC22HsNqw8K4jhoVDSUle5Yy8l\nUSk

Jurnal	PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI	https://e-resources.perpusnas. ngo.id:2117/media/publications/ n332202-penegakan-hukum-pidana- npengembalian-keru-51dc4ba8.pdf n?exp=1790918587&kid=1&sig=eXhT nSGJdnunr8haC5EgqlmakSs2X3LMjn3 n3u45_JxPM
Jurnal	Perampasan Aset dalam Perspektif Keadilan, Manfaat, Kepastian Hukum serta Pemberantasan Korupsi	https://jurnal.untirta.ac.id/i ndex.php/yustisia/article/view n/30866/14581
Jurnal	Proposal for policy change in the procedure of civil asset forfeiture	https://routledgeopenresearch. norg/articles/2-1
Jurnal	Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In REM)	Journal of Human And Education Volume 4, No. 6, Tahun 2024, pp 1124-1132 E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876 Website: https://jahe.or.id/index.php/j ahe/index
Jurnal	Ruang Lingkup Perampasan Aset dalam Kebijakan Hukum Pidana: Pembatasan atau Perluasan Tipikor	https://berkas.dpr.go.id/pusak a/files/policy_brief/Policy%20 nBrief-31-1-M-2026.pdf
Jurnal	URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	https://ejournal.fisip.unjani. nac.id/index.php/Rechtswetensch nap/article/view/3587/1267
Dokumen	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	https://bphn.go.id/data/docume nnts/hasil_penyelarasan_na_ruu_ ntentang_perampasan_aset.pdf
Undang-undang & Peraturan	Proses Legislasi Undang-Undang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana	https://www.dpr.go.id/kegiatan n-dpr/fungsi-dpr/fungsi-legisla nsi/partisipasi-legislasi/detai n/RUU-tentang-Perampasan-Aset- nRUU-tentang-Perampasan-Aset-Te nrkait-Dengan-Tindak-Pidana--70 n7